

**BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN KEMISKINAN  
(STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA TAHUN 2012-2013)**

Oleh :  
Bayu Rizqi Bachtiar  
NIM : 232011067

**KERTAS KERJA**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Guna Memenuhi Sebagian dari  
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**



**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
2015**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Rizqi Bachtiar  
NIM : 232011067 Email : bayurizqibachtiar@yahoo.com  
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Program Studi : Akuntansi  
Judul tugas akhir : Belanja Bantuan Sosial dan Kemiskinan (Studi kasus di Kota Salatiga tahun 2012 - 2013)  
Pembimbing : 1. Marwata, SE, M.Si, Ph.D, Akt, CA  
2. \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 09 Maret 2015





## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Rizqi Baehar  
NIM : 232011067 Email : bayurizqibaehar@yahoo.com  
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Program Studi : Akuntansi  
Judul tugas akhir : Belanja Bantuan Sosial dan Kemiskinan (Studi kasus di Kota  
Salatiga tahun 2012 -2013)

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.  
\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 9 Maret 2015

Bayu Rizqi B.  
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II



FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
Jalan Diponegoro 52-60  
Telepon (0298) 321212, 311811  
Telex 322364 ukswsa ia  
Salatiga 50711 – Indonesia  
Fax. (0298) 321433

### **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Rizqi Bachtiar  
NIM : 232011067  
Program Studi : AKUNTANSI  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Kristen Satya Wacana  
Salatiga

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi,

Judul : Belanja Bantuan Sosial dan Kemiskinan  
(Studi Kasus di Kota Salatiga Tahun 2012-2013).  
Pembimbing : Marwata, SE, M.Si, PhD, Akt, CA  
Tanggal diuji : 24 Februari 2015

Adalah benar-benar hasil karya saya.

Di dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Salatiga, 9 Februari 2015

Yang memberi pernyataan,

Bayu Rizqi Bachtiar

**BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN KEMISKINAN  
(STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA TAHUN 2012-2013)**

Oleh :

Bayu Rizqi Bachtiar  
NIM : 232011067

**KERTAS KERJA**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Guna Memenuhi Sebagian dari  
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi

**FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

Disetujui oleh :



Marwata, SE, M.Si, Ph.D, Akt, CA  
Pembimbing

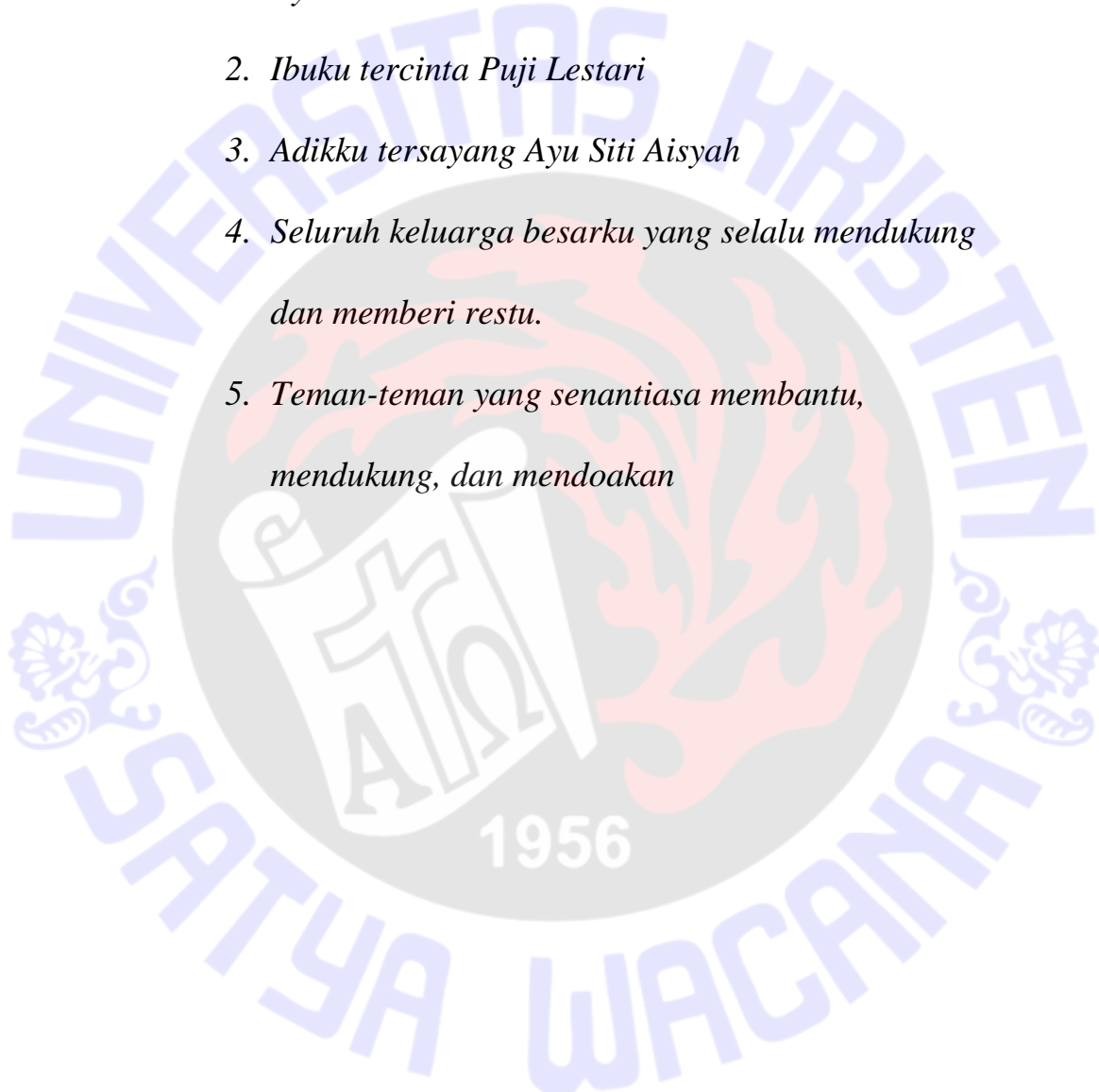
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
2015**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya tulis skripsi ini kepada :*

- 1. Ayahku tercinta Khubaibin*
- 2. Ibuku tercinta Puji Lestari*
- 3. Adikku tersayang Ayu Siti Aisyah*
- 4. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberi restu.*
- 5. Teman-teman yang senantiasa membantu, mendukung, dan mendoakan*



## Motto

Dan bahkan manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

(Q.S. an-Najm/53: 39-41)

“Adigang, adigung, adiguno “

jaga kelakuan, jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan, ataupun latarbelakangmu.

( Petatah Jawa)



## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 pada progdi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Skripsi ini berjudul BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN KEMISKINAN(STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA TAHUN 2012-2013).

Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segenap kritikan, masukan, dan saran yang membangun dari pembaca.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Salatiga, 24 Februari 2015

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah turut membantu dan senantiasa turut memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana.

Oleh karena itu dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

***Ayahku Khubaibin, Ibuku Puji Lestari, Adikku Ayu Siti Aisyah*** yang selalu mendukung, memotivasi dan memberi restu.

***Bapak Hari Sunarto, SE., MBA. PhD*** selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

***Bapak Usil Sis Sucahyo, SE., MBA.*** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

***Bapak Marwata, SE, MSi, PhD, Akt*** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan, bimbingan dan saran-saran maupun kritik yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

***Ibu Like Soegiono, SE., MSi*** selaku wali studi yang membimbing, mendidik dan memberi saran maupun kritik selama menempuh studi.

***Seluruh staf pengajar FEB-UKSW*** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.

*Seluruh staf TU FEB-UKSW* yang telah membantu penulis dalam pengurusan persyaratan administrasi skripsi.

*Bapak Agus, Bapak bambang, Ibu Laoda, Ibu Bhakti dan seluruh staf Bagian Akuntansi DPPKAD, staf Kesra SEKDA dan BAPEDA Kota Salatiga* yang telah membantu dalam perolehan data skripsi.

*Efratian Kristison, Mesakh, Sendi, Arron, Boe, Nia, Alif, Navika* yang telah memberi semangat, dukungan, dan menjadi kelompok yang baik selama kuliah dan penulisan skripsi.

*Aditya Dwiki Nugraha, Dionysius Ananta Gregori, Riska LD, Anisa Dewi Arismaya, Dianita KN dan beserta keluarga besar mereka* yang telah memberi semangat, dukungan, dan menjadi keluarga kedua selama menempuh studi.

*Andes, Arda, Titin, Iser, Tori, Ardi, bela, Fajar, Arin, Yudha, julia, Ardy, Deni, pandu, Didik dan Teman-teman angkatan 2011,* teman senasib seperjuangan. Terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, dan doanya selama ini.

*Kak Olin, kak Dimaz, Brikarisa, Mateus, Alvin, kak Nita, Kak Diva, Kak Luluk, kak Tri, kak Garry, Gandang, Erwin, kak Ine, Lilis, Puput, Amy, Sani, Rian, Sri, Priska, Rizka,* dan semua teman-teman Keluarga besar *Fungsionaris Kelompok Studi Akuntansi (KSA)* yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melatih sikap dan mental dalam berorganisasi selama menempuh studi.

Teman-teman *Korps Asisten Fakultas Ekonomika dan Bisnis.*

Teman-teman kepanitiaian *GO Ahead, JAC dan NASA, Makrab FUSSION ,  
Makrab PIRATES.*

Semua teman-teman, kakak angkatan maupun adik angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetap semangat dan terima kasih atas bantuannya selama kuliah.

Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan dukungan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan karunia serta rahmatNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Salatiga, Februari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Keaslian Karya Tulis.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Motto.....	v
Abstract.....	vi
Saripati.....	v
Kata Pengantar .....	vii
i	
Ucapan Terimakasih.....	ix
Daftar isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xi
v	
Daftar Lampiran.....	x

<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
--------------------------	---

## **LANDASAN TEORI**

Belanja Daerah .....	5
----------------------	---

Bantuan Sosial.....	6
---------------------	---

Kemiskinan .....	7
------------------	---

Kerangka Pemikiran.....	9
-------------------------	---

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian.....	10
------------------------	----

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diskripsi Objek Penelitian .....	13
----------------------------------	----

Analisis perbandingan realisasi BANSOS 2012 dengan tingkat kemiskinan 2011.....	14
--	----

Analisis perbandingan realisasi BANSOS 2013 dengan tingkat kemiskinan 2012.....	16
--	----

Uji Normalitas.....	18
---------------------	----

Uji Korelasi .....	19
--------------------	----

Pembahasan .....	20
------------------	----

## **PENUTUP**

Kesimpulan .....22

Keterbatasan dan Saran .....23

**DAFTAR PUSTAKA** .....24

**LAMPIRAN**.....37

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 perbandingan prosentase realisasi BANSOS tahun 2012 dengan  
prosentase kemiskinan tahun 2011 .....14

Tabel 2 perbandingan prosentase realisasi BANSOS tahun 2013 dengan  
prosentase kemiskinan tahun 2012 .....16

Tabel 3 hasil uji normalitas .....18

Tabel 4 hasil uji korelasi .....19

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Normalitas data prosentase realisasi bansos tahun 2012-2013 dan prosentase kemiskinan tahun 2011-2012.

.....26

Lampiran 2 Uji Korelasi data prosentase realisasi bansos tahun 2012 dengan prosentase kemiskinan tahun 2011.

.....26

Lampiran 3 Uji Korelasi data prosentase realisasi bansos tahun 2013 dengan prosentase kemiskinan tahun 2012.

.....27

Lampiran 4 Data prosentase penduduk miskin per kelurahan di Kota Salatiga tahun 2011-2012..

.....28





## **Pendahuluan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam APBD, bentuk pendistribusian kembali kekayaan negara oleh pemerintah terlihat dari alokasi belanja. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang dan jasa.

PMK Nomor 81 tahun 2012 pasal 1 menjelaskan bahwa Bansos adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan / atau kesejahteraan rakyat. Dan dijelaskan dalam pasal 2 bahwa resiko sosial adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,ekonomi,politik dan bencana alam. Selain itu menurut Bultek SAP nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Dalam Permendagri No.32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Dana Bansos yang berasal dari APBD telah ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana bansos. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah adanya laporan penggunaan dana bansos

yang harus dilaporkan rutin setiap tahun yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Namun Selama ini, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (Mardiasmo, 2002a).

Dilihat dari kebutuhannya, daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi seharusnya mendapatkan aliran dana bantuan sosial yang tinggi pula. Semakin miskin suatu daerah, maka kebutuhan di daerah tersebut semakin tinggi, sehingga seharusnya dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tinggi.

Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menjadi alat ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu negara. Secara teori semakin rendah angka kemiskinan suatu negara bisa dikatakan bahwa negara tersebut mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan muncul sebagai akibat dan adanya situasi ketidakadilan, ketimpangan serta ketergantungan dalam struktur masyarakat. Secara umum, kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya (Multifiah, 2011).

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan menyediakan beberapa kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti raskin, bantuan langsung tunai, program

keluarga harapan, bantuan operasional sekolah merupakan cara pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun dirasa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan belum menampakkan hasil yang optimal. Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia termasuk di dalamnya Kota Salatiga. Pada tahun 2011 jumlah warga miskin di Salatiga mencapai 13.300 jiwa. Sedangkan pada 2012 menurun menjadi 12.300 jiwa. Akan tetapi Jumlah warga miskin yang diambil dari data PPLS (Program Pendapatan Perlindungan Sosial) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 masih menunjukkan bahwa 7 kelurahan teridentifikasi miskin diantaranya Kumpulrejo, Noborejo, Kecandran, Mangunsari, Kutowinangun, Sidorejo Kidul, dan Blotongan. Jumlah rumah tangga miskin yang ada ditujuh kelurahan tersebut mencapai sekitar 8.212 kepala keluarga (KK). (Adi Setiarso,2013).

Meskipun prosentase penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami penurunan namun jumlahnya masih relatif tinggi, hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Kota Salatiga. Kota Salatiga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan tetapi ada beberapa daerah di kota Salatiga masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Realita mengenai bantuan sosial selama ini adalah potret suram anggaran negara atau daerah yang menjadi pos-pos anggaran dengan akuntabilitas rendah. Dana bantuan sosial mudah diselewengkan karena kurangnya transparansi dan kejelasan mekanisme penyaluran, penetapan penerima, maupun pelaporannya Santosa (2014). Sedangkan menurut Dahlan (2014) alasan sejumlah dana bantuan sosial mudah diselewengkan adalah minimnya pengaturan yang mengikat pengelolaan belanja bantuan sosial, belanja bantuan sosial lekat dengan program dan kegiatan bersifat populis sehingga tidak tepat sasaran, dan pada momen-momen tertentu, misalnya Pemilu, bantuan sosial rawan dipolitisasi. Realita ini bertolak belakang karena sebenarnya Belanja bantuan sosial diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai perlindungan risiko sosial.

Fenomena tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam pemberian dana bantuan Sosial kepada masyarakat

sesuai dengan jumlah penduduk miskin setiap wilayah di daerah tersebut. Secara teori, seharusnya wilayah yang angka kemiskinannya tinggi juga akan mendapat alokasi anggaran dana bantuan yang tinggi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada penelitian ini akan diteliti hubungan realisasi penyaluran dana bantuan sosial dengan karakteristik penerima dana tersebut. Secara spesifik pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah, apakah ada hubungan antara jumlah penduduk miskin sebuah wilayah dalam daerah tersebut dengan alokasi dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teori maupun aplikasi. Secara teori, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang sektor publik, terkhusus mengenai dana bansos. Dari sisi aplikasi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta bahan evaluasi untuk melakukan penegakan aturan mengenai dana bansos serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana bansos yang diberikan kepada masyarakat sehingga pemberian dana bansos tepat sasaran.

Kertas kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut, bagian pertama dari kertas kerja ini adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua adalah tinjauan pustaka, yang berisi landasan teori terkait dengan penelitian ini. Bagian ketiga dari proposal ini berisi tentang penjelasan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan tentang jenis sumberdata serta metode analisis dalam kertas kerja ini.

## **LANDASAN TEORI**

### **Belanja Daerah**

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dan perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Sasana, 2011). Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

## **Bantuan Sosial (BANSOS)**

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP) Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang atau barang memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

Tujuan penggunaan dana belanja bantuan sosial yang diatur dalam Bultek SAP Nomor 10 yang ditetapkan 9 Maret 2011 hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang bertujuan untuk :

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan seharusnya memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus-menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran.

## **Kemiskinan**

Pada awalnya Studi tentang kemiskinan Charles Both dan B. Seebom Rowntree (Townsend, 1954), mengatakan bahwa: (1) Keluarga yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan ini disebut dengan kemiskinan primer. (2) Keluarga yang pendapatannya secara keseluruhan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik semata atau disebut juga dengan kemiskinan sekunder.

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Marianti dan Munawar (2006) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur dengan terminologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati. Niemietz (2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan.

Dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 Pasal 5 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program bantuan sosial berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat untuk keluarga miskin. Cakupan program bantuan sosial diantaranya pemberian beras bagi rakyat miskin (raskin), bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini, dan bantuan kesehatan melalui pemberian pelayanan kesehatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam menentukan kemiskinan di Indonesia. Seseorang tergolong dalam kategori miskin bila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*), dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi



kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Batas kecukupan kebutuhan makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan tertentu yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan batas kecukupan nonmakanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Jumlah Rumah Tangga Miskin. Kriteria kemiskinan menurut PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2011, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati masih sewa atau bukan milik sendiri.
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
3. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan.
4. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
5. Jenis atap tempat tinggal terbuat dari ijuk/rumbia/seng dan kondisi atap berkualitas jelek/rendah.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Cara memperoleh air minum yang masih mengambil dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
8. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
9. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
10. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
11. Tempat pembuangan akhir tinja yang masih menggunakan sungai/danau/laut/lubang tanah/kebun.

12. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
13. Menjadi peserta program beras untuk orang miskin (Raskin).

### **Kerangka pemikiran**

Belanja bantuan sosial adalah salah satu jenis pos belanja tidak langsung, yang memiliki tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Menurut Bultek SAP Nomor 10 mengenai Akuntansi Bantuan Sosial, menyebutkan bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Pengertian lain yang dikutip dari *Social Risk Management: The World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*, risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan kejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.

Salah satu tujuan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana disebutkan dalam Bultek SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Bantuan Sosial adalah untuk penanggulangan kemiskinan dimana merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu berdasarkan pemikiran diatas dan fungsi bansos sebagai jaring pengaman dari resiko sosial , bahwa kemiskinan (pada tahun  $t$ ) akan dijadikan dasar penda untuk mengalokasikan realisasi bansos (pada tahun  $t+1$ ). Sehingga secara teoritis, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi (pada tahun  $t$ ) akan memiliki alokasi realisasi dana bantuan sosial yang tinggi juga pada tahun berikutnya (tahun  $t+1$ ).

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menyusun hipotesis besarnya realisasi dana bantuan sosial tahun ( t ) yang dialokasikan dalam APBD Kota Salatiga untuk setiap kelurahan berhubungan dengan jumlah penduduk miskin setiap kelurahan pada tahun ( t-1 ).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Menurut Whitney (1960:160), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan menurut Nazir (2005:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Kota Salatiga. Kota Salatiga dipilih karena melihat dari hasil audit oleh BPK pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengalokasian belanja bantuan sosial menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2011 yakni 92,7% sehingga memunculkan pertanyaan kemana sajakah bantuan sosial tersebut mengalir. Selain itu sebagai objek penelitian Kota Salatiga dipilih karena kemudahan akses peneliti dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di kantor pemerintah Kota Salatiga untuk dapat memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian khususnya data mengenai tingkat kemiskinan daerah dan informasi mengenai pembelanjaan Dana Bantuan sosial dalam APBD kota Salatiga .

Data yang digunakan adalah data sekunder artinya data tersebut sudah tersedia dan dapat di akses. Data yang dibutuhkan akan di peroleh dari BPS dan website pemerintah Kota Salatiga maupun melakukan permintaan data langsung

ke kantor pemerintah kota Salatiga khususnya di BAPEDA (badan perencanaan pembangunan daerah) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga dalam bentuk dokumentasi. Data sekunder tersebut meliputi data realisasi belanja bantuan sosial dan angka kemiskinan di Kota Salatiga. Berikut rincian mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data kemiskinan setiap keurahan diperoleh dari BAPEDA Kota Salatiga.
2. Data jumlah penduduk setiap kelurahan diperoleh dari *website* BPS Kota Salatiga.
3. Data realisasi bansos diperoleh dari LRA yang diminta dari bagian akuntansi DPPKAD Kota Salatiga.
4. Rincian tambahan terkait penerima bansos tidak direncanakan diperoleh dari bagian KESRA SEKDA Kota Salatiga.

Untuk mengurangi bias data, angka kemiskinan dan belanja bantuan sosial disajikan dalam bentuk prosentase, Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan prosentase angka kemiskinan dan prosentase realisasi belanja bantuan sosial selama 2 tahun, yaitu prosentase kemiskinan tahun 2011-2012 dibandingkan dengan prosentase realisasi bantuan sosial tahun 2011 – 2012 dan juga analisis korelasi untuk melihat kaitan antara angka kemiskinan dengan belanja bantuan sosial. Rumus untuk mencari prosentase kemiskinan sebagai berikut :

$$\text{Prosentase kemiskinan} = \frac{\text{jumlah Penduduk Miskin setiap kelurahan}}{\text{Jumlah Penduduk setiap kelurahan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mencari prosentase realisasi belanja sosial adalah realisasi belanja bantuan sosial setiap kelurahan di Kota Salatiga dibagi dengan total realisasi belanja bansos Kota Salatiga yang akan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Prosentase bansos} = \frac{\text{Belanja Bansos setiap kelurahan}}{\text{Total belanja bansos Kota Salatiga}} \times 100\%$$

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi prosentase penduduk miskin di setiap kelurahan yang ada di Kota Salatiga tahun 2011 dan 2012.
2. Mengidentifikasi prosentase realisasi belanja bantuan sosial di setiap kelurahan yang ada di Kota Salatiga selama tahun 2012 dan 2013.
3. Melakukan *ranking* kelurahan yang memiliki prosentase penduduk miskin yang paling tinggi sampai dengan kelurahan yang memiliki prosentase penduduk miskin paling rendah di Kota Salatiga.
4. Melakukan *ranking* kelurahan yang memiliki prosentase realisasi belanja bantuan sosial yang paling tinggi sampai dengan kelurahan yang memiliki prosentase realisasi belanja bantuan sosial paling rendah di Kota Salatiga.
5. Membandingkan kelurahan dengan prosentase kemiskinan paling tinggi sampai dengan prosentase paling rendah di Kota Salatiga dengan prosentase realisasi belanja bantuan sosial yang paling tinggi sampai dengan prosentase realisasi bantuan sosial yang paling rendah di Kota Salatiga.
6. Mengidentifikasi adanya hubungan prosentase kemiskinan dengan prosentase realisasi belanja bantuan sosial melalui uji korelasi. Uji korelasi yang dilakukan menggunakan data prosentase kemiskinan tahun ( t ) dan prosentase realisasi belanja bantuan sosial tahun ( t+1 ) di Kota Salatiga. Data diolah dengan program aplikasi SPSS versi 20. Pemilihan jenis pengujian uji korelasi dilakukan setelah melakukan pengujian normalitas. Untuk data yang berdistribusi normal ( $p\text{-value} > \alpha$ ) maka digunakan pengujian parametrik yaitu dengan uji korelasi *Pearson*, sementara untuk data berdistribusi tidak normal ( $p\text{-value} < \alpha$ ) menggunakan uji korelasi *Speraman*. Tingkat keyakinan ditetapkan sebesar 95%

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Diskripsi Objek Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Salatiga tahun 2012-2013. Dimana di Kota Salatiga terdapat 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Data yang digunakan adalah rincian realisasi bansos tahun 2012 dan 2013 yang sudah dikelompokkan oleh peneliti berdasarkan kelurahan yang ada di Kota Salatiga. Pada tabel 1-2 dibawah akan menjelaskan bagaimana tingkat prosentase kemiskinan tahun 2011 dan 2012 dengan prosentase realisasi bantuan sosial yang diterima per kelurahan tahun 2012 dan 2013. Karena secara teori, kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi juga akan mendapatkan realisasi bantuan sosial yang tinggi juga. Kedua variabel tersebut dihubungkan oleh anak panah yang akan mempermudah untuk menunjukkan hubungan kedua variabel. Berikut daftar tabel 1-2:

**Analisis perbandingan realisasi BANSOS 2012 dengan tingkat kemiskinan 2011**

**Tabel 1**

Ranking prosentase kemiskinan tahun 2011 dengan data realisasi Bansos tahun 2012.

No	Kelurahan	kemiskinan 2011	Realisasi bansos 2012	Kelurahan	No
1	noborejo	48,5%	9,8%	Kotawinangun	1
2	kecandran	37,3%	9,8%	Mangunsari	2
3	kumpulrejo	35,6%	9,2%	Salatiga	3
4	kalibening	32,6%	5,9%	Blotongan	4
5	Bugel	30,2%	5,8%	sodorejo kidul	5
6	randuacir	30,2%	5,3%	Ledok	6
7	sodorejo kidul	28,3%	5,2%	Dukuh	7
8	tingkir lor	27,8%	4,6%	Noborejo	8
9	Pulutan	25,4%	4,6%	soidorejo lor	9
10	Dukuh	20,0%	4,6%	Tegalrejo	10
11	mangunsari	18,4%	3,7%	tingkir lor	11
12	cebongan	16,8%	3,5%	Pulutan	12
13	kauman kidul	15,4%	3,3%	tingkit tengah	13
14	blotongan	15,1%	3,3%	Kecandran	14
15	tingkit tengah	15,1%	3,2%	Cebongan	15
16	Ledok	14,6%	3,1%	Randuacir	16
17	soidorejo lor	14,4%	2,8%	Gendongan	17
18	kalicacing	13,3%	2,8%	Bugel	18
19	kotawinangun	12,7%	2,8%	Kumpulrejo	19
20	Tegalrejo	12,6%	2,4%	kauman kidul	20
21	Salatiga	9,2%	2,3%	Kalibening	21
22	gendongan	7,4%	2,1%	Kalicacing	22

Sumber : badan pusat statistik kota salatiga, DPPKAD Kota Salatiga ,BAPPEDA Kota Salatiga , Bagian Kesra SETDA Kota Salatiga.

Tabel 1 menunjukkan peringkat dari prosentase kemiskinan setiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2011 dan peringkat dari prosentase realisasi belanja bantuan sosial yang diterima setiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2012. Penjelasannya adalah sebagai berikut ; kelurahan noborejo yang memiliki prosentase kemiskinan terbesar (48,5%) memiliki prosentase realisasi bansos sebesar (4,6%) dari total realisasi bansos tahun 2012 atau peringkat ke-8 dalam prosentase realisasi bansos 2012, jumlah (4,6%) ini sama dengan jumlah prosentase realisasi bansos untuk kelurahan sidorejo lor dan kelurahan tegalrejo yang menurut peringkat adalah peringkat ke-9 dan ke-10 padahal kelurahan sidorejo lor hanya memiliki prosentase kemiskinan sebesar (14,4%) atau secara peringkat adalah urutan ke-17 dan kelurahan tegalrejo hanya memiliki prosentase kemiskinan sebesar (12,6%) atau secara peringkat adalah urutan ke-20. Kelurahan kecandran yang menempati peringkat kedua dengan prosentase kemiskinan sebesar (37,3%) ternyata juga memiliki alokasi realisasi bansos yang sama besar dengan dengan kelurahan tinggkir tengah yaitu sebesar (3,3%) padahal secara prosentase kemiskinan kelurahan tinggkir tengah hanya memiliki prosentase sebesar (15,1%) atau menempati peringkat ke-15. Selanjutnya adalah kelurahan kumpulrejo yang menempati peringkat ketiga prosentase kemiskinan dengan prosentase (35,6%) ternyata hanya memiliki alokasi realisasi bansos ditahun 2012 sebesar (2,8%), jumlah inipun sama besar dengan yang diterima kelurahan gendongan dan kelurahan bugel padahal kelurahan gendongan adalah kelurahan dengan prosentase kemiskinan paling kecil (7,4%). Kelurahan kutowinangun, kelurahan mangunsari dan kelurahan salatiga adalah tiga kelurahan yang mendapatkan alokasi realisasi bansos terbesar di tahun 2012 padahal jika dilihat dari prosentase kemiskinan di tahun 2011 tiga kelurahan ini memiliki prosentase kemiskinan yang relatif kecil, bahkan kelurahan salatiga hanya memiliki (9,2%) atau secara peringkat adalah urutan ke-21.



**Analisis perbandingan realisasi BANSOS 2013 dengan tingkat kemiskinan 2012**

**Tabel 2**

Ranking prosentase kemiskinan tahun 2012 dengan data realisasi Bansos tahun 2013

No	Kelurahan	Kemiskinan 2012	Realisasi bansos 2013	Kelurahan	No
1	noborejo	47,7%	10,3%	Kecandran	1
2	kecandran	36,6%	9,7%	Salatiga	2
3	kumpulrejo	35,1%	7,9%	Kotawinangun	3
4	kalibening	32,1%	6,7%	Randuacir	4
5	randuacir	29,7%	6,1%	sodorejo kidul	5
6	bugel	27,9%	4,7%	Tegalrejo	6
7	sodorejo kidul	27,8%	4,5%	Kumpulrejo	7
8	tingkir lor	27,3%	4,4%	tingkir lor	8
9	pulutan	24,9%	4,3%	Blotongan	9
10	dukuh	19,7%	4,0%	Dukuh	10
11	mangunsari	18,3%	4,0%	tingkit tengah	11
12	cebongan	16,5%	3,8%	Cebongan	12
13	blotongan	14,9%	3,8%	kauman kidul	13
14	tingkit tengah	14,8%	3,5%	soidorejo lor	14
15	kauman kidul	14,8%	3,5%	Kalibening	15
16	soidorejo lor	14,4%	3,5%	Pulutan	16
17	ledok	14,3%	3,2%	Noborejo	17
18	kalicacing	13,5%	3,1%	Mangunsari	18
19	kotawinangun	12,6%	3,1%	Gendongan	19
20	tegalrejo	12,4%	2,8%	Kalicacing	20
21	salatiga	9,2%	2,1%	Ledok	21
22	gendongan	7,3%	0,9%	Bugel	22

Sumber : badan pusat statistik kota salatiga, DPPKAD Kota Salatiga ,BAPPEDA Kota Salatiga , Bagian Kesra SETDA Kota Salatiga.

Tabel 2 menunjukkan peringkat dari prosentase kemiskinan setiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2012 dan peringkat dari prosentase realisasi belanja bantuan sosial yang diterima setiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2013. Penjelasannya adalah sebagai berikut ;

Kelurahan noborejo memiliki prosentase tertinggi yaitu sebesar (47,7%) pada tahun 2012, tetapi pada realisasi anggaran belanja bantuan sosial tahun 2013 kelurahan noborejo hanya mendapatkan sebesar (3,2%) atau peringkat ke-17. Peringkat kedua adalah kelurahan kecandran dengan prosentase kemiskinan sebesar (36,6%) ,walaupun secara peringkat kemiskinan kelurahan ini masi sama dengan tahun 2011 akan tetapi jumlah realisasi bansos yang diterima kelurahan kecandran sangat jauh berbeda dengan realisasi tahun 2012 dimana kelurahan ini hanya mendapatkan realisasi sebesar (3,3%) ditahun 2012 dan di tahun 2013 ini kelurahan kecandran mendapatkan realisasi sebesar (10,3%) atau yang paling besar ditahun 2013. Kelurahan yang mendapatkan prosentase realisasi bansos terbesar kedua adalah kelurahan salatiga dengan prosentase sebesar (9,7%) akan tetapi sebenarnya kelurahan salatiga hanya memiliki prosentase kemiskinan sebesar (9,2%) atau dalam peringkat menempati urutan ke-21. Begitu juga dengan kelurahan kutowinangun yang sebenarnya hanya memiliki prosentase kemiskinan sebesar (12,6%) tetapi mendapatkan realisasi bansos sebesar (7,9%). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan beberapa kelurahan yang sebenarnya memiliki prosentase kemiskinan yang besari namun mendapatkan alokasi realisasi bansos yang kecil. Seperti kelurahan kalibening dengan prosentase kemiskinan sebesar (32,1%) hanya mendapatkan (3,5%) realisasi bansos. Begitu juga dengan kelurahan bugel yang memiliki prosentase kemiskinan sebesar (27,9%) ternyata hanya mendapatkan realisasi bansos paling rendah yaitu sebesar (0,9%) dari total realisasi bansos Kota Salatiga tahun 2013.

### Uji Normalitas

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dan *Shapiro Wilk* dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dalam uji normalitas ini digunakan prosentase dari angka kemiskinan untuk mengurangi bias, yaitu dengan membagi dengan jumlah penduduk per kelurahan dengan jumlah penduduk miskin per kelurahan dan realisasi bantuan sosial per kelurahan yang dibagi dengan realisasi bansos kota salatiga. Dalam melakukan pengujian data, penulis menggunakan SPSS versi 20 untuk mengetahui apakah dari kedua variabel tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila dalam uji normalitas diperoleh signifikansi dari salah satu variabel kurang dari 5% (*alpha*), maka variabel tersebut dinyatakan berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari uji normalitas menggunakan SPSS :

**Tabel 3 Uji Normalitas**

No	Variabel yang diuji	Signifikansi	Distribusi
1	Kemiskinan tahun 2011	0,064	Normal .
2	Kemiskinan tahun 2012	0,076	Normal .
3	Realisasi Bansos 2012	0,001	Tidak normal .
4	Realisasi Bansos 2013	0,004	Tidak normal.

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2014.

Dari hasil uji normalitas pada tabel 3, ditemukan hasil bahwa data kemiskinan tahun 2011 dan 2012 berdistribusi normal. Untuk data realisasi bantuan sosial tahun 2012 dan 2013 berdistribusi tidak normal.

## Uji Korelasi

Uji korelasi merupakan teknik analisis pengukuran asosiasi/hubungan (*measures of association*) yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel. Dalam uji korelasi ini penulis menggunakan uji korelasi nonparametrik (*Spearman*) karena salah satu variabelnya atau kedua variabel tidak memenuhi kriteria normalitas. Berikut ini adalah hasil pengujian korelasi yang dilakukan :

**Tabel 4 Uji Korelasi**

No	Variabel yang dikaitkan	Jenis uji korelasi	Signifikansi	Hasil uji korelasi
1	Kemiskinan tahun 2011 dengan realisasi tahun 2012.	Non parametrik	0,291	Tidak berkorelasi
2	Kemiskinan tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013.	Non parametrik	0,930	Tidak berkorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2014

Dari hasil uji korelasi nonparametrik, diperoleh hasil pada tabel 4 bahwa dari seluruh variabel yang dikaitkan ternyata tidak ada yang berkorelasi atau tidak mempunyai hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nilai signifikansi semua variabel diatas *alpha* (0,05) yang berarti hipotesis awal penulis tidak didukung bukti empiris dengan kata lain prosentase kemiskinan di Kota Salatiga tidak memiliki korelasi dengan prosentase realisasi bantuan sosial Kota Salatiga.

## Pembahasan

Dalam Pasal 23 permendagri No 32 Tahun 2011 maupun PMK Nomor 81 tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa penerima bansos adalah Anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Namun menurut (Mardiasmo, 2014) dari sisi regulasi ada yang perlu diklarifikasi. Bantuan sosial sejatinya dialokasikan untuk orang yang betul-betul perlu dibantu. Jika tidak, akan dikhawatirkan mereka tidak memiliki peluang untuk bangkit dan tidak bisa keluar dari permasalahannya. Untuk program-program seperti pembangunan gedung sekolah, infrastruktur dan lain-lain, adalah kegiatan rutin dan tidak perlu masuk bansos. Bansos ini ditujukan lebih ke orang, apakah itu perorangan, keluarga, atau kelompok. Jadi, bukan untuk institusi. Dalam perkembangannya bansos memiliki banyak interpretasi dan implementasi, ada yang mengimplementasikan bansos untuk program kesejahteraan, tetapi masih ada aliran bansos yang mengarah ke kegiatan politik, hal itu menyebabkan bansos tidak sesuai tujuan utamanya bahwa pengertian bansos sebenarnya itu apa, sasarannya kemana, lalu peruntukannya seperti apa. Penyaluran dana bansos ini harus tepat sasaran sehingga di awal kriterianya harus jelas. Karena kalau landasannya tidak jelas, di lapangan interpretasi dan implementasinya bisa bermacam-macam. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk membenahi sektor publik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa prosentase kemiskinan setiap kelurahan di Kota Salatiga bukan merupakan faktor yang menentukan besarnya prosentase realisasi dana bantuan sosial. Secara matematis, tingkat prosentase kemiskinan dengan prosentase realisasi bansos tiap kelurahan menunjukkan hasil

negatif. Pola yang tidak teratur terjadi secara keseluruhan antara perentase kemiskinan dengan realisasi bantuan sosial yang dapat dilihat pada tabel 1-2. Dengan prosentase tingkat kemiskinan yang tinggi suatu kelurahan (pada tahun  $t$ ) tidak lantas membuat realisasi bantuan sosial suatu kelurahan itu (pada tahun  $t+1$ ) memiliki angka yang tinggi juga. Dan hal itu hampir semua terjadi di tingkat kelurahan di Kota Salatiga. Hasil penelitian ini membantah dugaan awal peneliti bahwa ada kaitan antara tingkat kemiskinan suatu kelurahan di Kota Salatiga dengan besarnya realisasi bansos yang akan diterima kelurahan tersebut. Diduga terdapat faktor lain yang akan menentukan besarnya realisasi dana bantuan sosial.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kaitan antara besarnya realisasi belanja bantuan sosial yang diterima setiap kelurahan di Kota Salatiga dengan jumlah penduduk miskin setiap kelurahan yang ada di Kota Salatiga. Dimana besaran realisasi bantuan sosial dan jumlah penduduk miskin disajikan dalam bentuk prosentase. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kelurahan yang memiliki prosentase kemiskinan yang tinggi lantas tidak membuat kelurahan tersebut mendapatkan alokasi dari prosentase realisasi belanja bantuan sosial yang tinggi juga. Hasil analisis data dengan membandingkan peringkat kemiskinan tahun sebelumnya ( $t-1$ ) dengan prosentase realisasi bantuan sosial pada tahun ( $t$ ) dan menggunakan uji korelasi diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan setiap kelurahan di Kota Salatiga dari tahun ( $t$ ) tidak memiliki korelasi dengan realisasi belanja bantuan sosial tahun ( $t+1$ ).

### **KETERBATASAN DAN SARAN**

Keterbatasan pada penelitian ini, yaitu: pertama, meskipun pelaporan realisasi belanja bansos sudah didasarkan pada regulasi terbaru yaitu permendagri No 32 tahun 2011 ketersediaan data yang masih sulit diperoleh karena ada beberapa data yang tidak dipublikasikan dan kurang kejelasan informasi dalam data yang ada sehingga menyebabkan ada perbedaan jumlah data yang digunakan pada penelitian ini. Kedua, penelitian ini belum bisa menjelaskan secara rinci faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya realisasi bantuan sosial. Ketiga penelitian ini hanya menggunakan data kemiskinan berdasarkan kriteria kemiskinan versi PPLS yang dikeluarkan oleh BPS. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data yang lebih baru dengan rentan waktu penelitian lebih lama dan menambah faktor lain sebagai variabel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2009. *Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 6, No.1.

Ariana, Suharyono dan Devianti, 2013. Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 ditetapkan 9 Maret 2011 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.

<http://sindonews.com/2013>

<http://koran.tempo.com/2011>

<http://www.koran-sindo.com/2011>

Handayani, Dwi, 2009. Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang

Kertati, Indra. 2013. *Analisis Kemiskinan Kota Semarang berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)*. Jurnal Riptek Vol. 7, No. 1, Hal. 27-38.

Kusumaningrum. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro

Majalah "Akuntansi Indonesia" edisi Juni 2014

Mardiasmo. 2003. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. Universitas Gadjah Mada

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi C.V.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Sasana, Hadi. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

